

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang juga merupakan otonomi daerah, termasuk Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerahnya. Sumber penerimaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didapat dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 nomor 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Warsito 2001:128) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, Sedangkan menurut (Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian dan daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah. di samping

pengelolaan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah. daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan digunakan dalam membangun daerahnya. salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor Pariwisata.

Menurut (Nirwandar 2006) menegaskan bahwa sektor Pariwisata sebagai mesin ekonomi penghasil devisa pembangunan. pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal ke daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara atau daerah asalnya yang melibatkan komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata tour, operator akomodasi, restoran hotel, transportasi dan yang lainnya. pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan hingga beragam wisata minat khusus.

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan berarti akan meningkatkan peran dalam penerimaan daerah di mana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti fasilitas yang ada pada sekitar daerah wisata tersebut infrastruktur yang dapat digunakan dengan baik, transportasi umum yang mudah diperoleh sehingga memudahkan perjalanan saat melakukan wisata serta

regulasi pemerintah tentang alokasi anggaran mengatur tentang pengembangan pariwisata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut.

Pengembangan industri pariwisata sendiri mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak sebagai industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah terutama bagi daerah yang merupakan daerah otonomi baru. Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal, dengan potensi daerah di sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut, harusnya dapat menjadi suatu batu loncatan untuk mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada.

Pengembangan potensi daerah tidak terlepas dari otonomi daerah. Menurut UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa adanya hak otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Salah satunya untuk mengurus keuangan daerahnya sendiri. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan daerah diperoleh dari menggali potensi daerah yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kaunang, Naukoko, & Londa, 2016).

Adapun otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan yang sudah berlaku, Menurut “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah”, dalam

rangka memberikan pelayanan dan mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka di bentuk suatu daerah otonom dan Menurut (Undang-Undang Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batasan daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sesuai arah dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berjalan sesuai asas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti halnya pembangunan nasional, dalam melaksanakan pembangunan di daerah, masalah dana dan pembiayaan pembangunan memegang peran yang sangat penting, oleh karena itu pendapatan asli daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih penghargaan Platinum di Indonesia Attractiveness Award (IAA) di bidang pariwisata. Penghargaan tersebut adalah penghargaan tertinggi dalam IAA. Indonesia Attractiveness Award sendiri merupakan suatu penghargaan bergengsi yang digagas oleh Tempo Media Grup Bersama Frontier Consulting Grup yang melakukan penilaian berdasarkan daya tarik terbaik yang mengacu pada empat dimensi meliputi investasi, pelayanan public, infrastruktur, dan pariwisata di 413 kabupaten, 95 kota dan 34 provinsi di Indonesia.

Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus berkembang membawa dampak pada Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar PAD yang dihasilkan suatu daerah dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Salah satu solusi untuk mendukung peningkatan PAD adalah menggali serta mengelola potensi sumber daya daerahnya yang berasal dari sektor pariwisata. Sebab dengan adanya pariwisata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Oktasa, Santoso, & Widyawati, (2020).

Tabel 1. 1
Jumlah Obyek Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Obyek wisata
2013	132
2014	132
2015	176
2016	135
2017	135
2018	186
2019	223
2020	193

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2013-2015 jumlah obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2015-2017 ada penurunan yang cukup signifikan dan pada tahun 2018-2019 jumlah objek wisata kembali bertambah, akan tetapi di tahun 2020 ada penurunan dikarenakan banyaknya objek wisata

yang sudah tidak layak dan di sehingga terabaikan dan terbengkalai begitu saja akibat dampak dari pandemi covid-19 dimana pada saat itu seluruh objek wisata sempat ditutup.

Potensi obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah tinggi dan cukup lengkap mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, dan lain-lain yang cukup lengkap dan beraneka ragam.

Dengan banyaknya potensi dan keanekaragaman obyek wisata serta penunjang fasilitas pariwisata yang ditawarkan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara ataupun Mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. 2
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan
2013	12842295
2014	16774235
2015	18545683
2016	20710976
2017	24821536
2018	26515788
2019	28324394
2020	10830143

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel di atas dari tahun 2013-2020 jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa daya tarik wisatawan dari Nusantara hingga Mancanegara terhadap objek wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah tinggi, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah

kunjungan wisatawan menurun drastic akibat adanya pandemi covid-19 yang membuat sejumlah kegiatan wisata sangat di batasi.

Semakin tinggi jumlah wisatawan maka jumlah akomodasi juga semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta. Peningkatan tersebut dapat berasal dari pajak daerah seperti pajak hotel serta pajak restoran, dan retribusi daerah seperti retribusi atau tiket masuk objek wisata yang ditawarkan.

Tabel 1. 3
Jumlah Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Hotel (Unit)
2013	1.170
2014	1.138
2015	1.166
2016	1.204
2017	1.179
2018	1.618
2019	1.799
2020	2.123

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif dengan jumlah tertinggi ditahun 2017 sebanyak 1.179 unit dan yang paling rendah ditahun 2014 sebanyak 1.138 unit. Namun pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertumbuhan jumlah hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup signifikan mengindikasin bahwa potensi sektor pariwisata sangat diminati wisatawan, baik wisatwan

Nusantara atau Mnacanegara dimana jumlah hotel tersebut akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.

Tabel 1. 4
Jumlah Biro Perjalanan Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah biro perjalanan
2013	459
2014	567
2015	677
2016	592
2017	655
2018	701
2019	694
2020	714

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel jumlah biro perjalanan wisata di daerah istimewa yogyakarta dari tahun 2013-2020 mengalami fluktuaktif, dimana jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 714 unit dan jumlah terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 459 unit.

Hadirnya biro perjalanan wisata sangat mendukung dalam meningkatkan industri pariwisata di karenakan memegang peran penting dalam memeberikan suatu pelayanan yang nyata untuk para wisatawan karena di anggap lebih praktis untuk melakukan perjalanan wisata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tentang pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2020. Maka peneliti

membuat judul tentang “Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2013-2020).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?.
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?.
3. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?.
4. Bagaimana jumlah biro perjalanan wisata terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Menganalisis pengaruh jumlah biro perjalanan wisata terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

- 1. Diharapkan mampu memahami akan seberapa besar dan penting kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.

b) Manfaat Praktisi

- 1. Untuk instansi terkait penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata.
- 2. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah informasi yang berguna tentang kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.